

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang menganut sistem politik demokrasi yang dalam penerapannya menginginkan kebebasan partisipasi yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Bangsa dan Negara. Salah satu perannya dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia melalui pemilihan umum. Untuk mewujudkan itu maka Pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah upaya membangun demokrasi di Indonesia.

Demokrasi di Indonesia telah mengalami proses transisi demokrasi dari otoriter ke demokratis, telah memunculkan berbagai terobosan pemikiran tentang paradigma pemerintahan yang *progresif-responsif* sebagai bentuk perkembangan baru dari konsep dan teori *trias politica*. Kemunculan organ kekuasaan baru tersebut, jangan dipandang sebagai bentuk kegagalan ataupun pergeseran dari paradigma *trias politica*, tetapi harus dibaca sebagai bentuk penyesuaian diri negara dalam sistem yang *progresif-responsif* dan terbuka terhadap perkembangan alur sistem kenegaraan untuk dapat menfleksibelkan perubahan hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan sosial politik menjadi sebuah realitas untuk mempertahankan stabilitas sistem menuju tertib politik hukum dalam kerangka pembenahan peengaturan *trias politica*.

Secara umum, terdapat juga perspektif Hukum Tata Negara yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia membagi lembaga negara dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Lembaga tinggi negara (*main state organs*).
2. Lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*), baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*) maupun sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*).

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, pada tahun 1999 maka diharuskan anggota KPU adalah non-partisan dan independen.

Partisipasi politik merupakan sebuah aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik.

Dalam hubungan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh bagi legitimasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.

Pada tahun 2018 ini, diberbagai daerah Provinsi, masyarakat Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum. Fakta dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu ada dan cenderung meningkat ataupun naik hanya beberapa persen dari setiap pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi pada Pilkada Kota Pekanbaru 2018 yang lalu tingkat partisipasi hanya sebesar 65.46%. Masih ada juga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus agar hal ini tidak terjadi pada pemilu berikutnya. Adapun surat suara yang tidak terpakai adalah salah satunya bentuk bukti terbuangnya secara sia-sia anggaran negara yang telah dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemilu ini.

Masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi suatu masalah yang serius yang terjadi pada pilukada Provinsi Riau. Untuk menjelaskan masalah partisipasi ini akan dipaparkan dengan data sebagai berikut.

**Tabel. I. 1 : Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Provinsi Riau tahun 2018.**

No	Kabupaten/Kota	Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih
1	Bengkalis	87.40%	12.60%
2	Indragiri Hilir	62.21%	37.82%
3	Indragiri Hulu	52.82%	47.23%
4	Kampar	57.81%	42.22%
5	Kepulauan Meranti	58.04%	42.04%
6	Dumai	56.25%	43.82%
7	Pekanbaru	65.46%	34.54%
8	Kuantan Singingi	58.32%	41.74%
9	Pelalawan	62.13%	37.88%
10	Rokan Hilir	78.25%	21.80%
11	Rokan Hulu	61.47%	38.64%
12	Siak	62.12%	37.92%
	Jumlah	64.82%	35.18%

*Sumber : KPU Kota Pekanbaru 2018*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 64.82% masyarakat Provinsi Riau yang memilih, dan yang tidak memilih sebesar 35.18% pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, adapun pada Kota Pekanbaru tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 65.57% yang memilih, kemudian daerah Rokan Hilir yang memiliki persentasi partisipasi pemilih 78.25%, disusul lagi yang presentasinya lebih tinggi yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 86.48% pemilih, partisipasi di daerah bengkalis lebih antusias dari pada pemilih di Kota Pekanbaru. Dari data ini kita bisa melihat bahwa partisipasi masyarakat kota pekanbaru masih bisa dikatakan rendah.

**Tabel. I. 2 : Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Provinsi Riau tahun 2018.**

No	Kecamatan	Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih
1	Sukajadi	63.33%	36.10%
2	Pekanbaru	66.95%	32.45%
3	Sail	66.60%	33.46%
4	Lima Puluh	61.43%	39.12%
5	Senapelan	70.05%	29.32%
6	Rumbai	63.96%	35.77%
7	Bukit Raya	66,37%	34.28%
8	Tampan	63.48%	35.90%
9	Marpoyan Damai	63.74%	36.03%
10	Tenayan	63.54%	36.22%
11	Payung Sekaki	62.01%	37.98%
12	Rumbai Pesisir	65.29%	34.20%
	Jumlah	65.46%	35.58%

**Sumber : KPU Kota Pekanbaru 2018**

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa 65.46% masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ikut memilih pada pemilihan kepala daerah Provinsi Riau, dan yang tidak ikut memilih ataupun golput berada 35.58% persentase partisipasi masyarakat kota pekanbaru pada pemilihan kepala daerah Provinsi Riau tahun 2018.

Faktor penyebab kenapa para pemilih tidak menyampaikan atau menggunakan hak pilihnya memang mempunyai beberapa alasan seperti : sudah apatisnya para pemilih terhadap kandidat yang akan maju untuk menjabat, bagaimana upaya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, para pemilih yang sudah merasa bosan atau jenuh dengan kegiatan pemilu yang kesannya seperti terus-menerus, adapun masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT daerahnya masing masing, kepercayaan rendah atau adanya kekecewaan (terhadap penyelenggara

Pemilu, peserta Pemilu yaitu calon legislatif, calon pemimpin daerah dan partai politik), kurang daya dorong terhadap masyarakat, kesadaran masyarakat rendah. Dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi, menjadi tidak ingin berpartisipasi, tidak tahu hari pemungutan suara dan lain-lain.

Dalam upaya KPU Kota Pekanbaru untuk mengurangi angka golput guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kota Pekanbaru dalam menggunakan hak pilihnya yaitu dengan metode sosialisasi tatap muka dan pendidikan politik pada Pemilu 2018 diantaranya yaitu melakukan publikasi melalui media masa, elektronik, dan media cetak. Dengan cara menyebarkan spanduk dan baliho hingga ketingkat Kelurahan, RRI dll. Selain itu, KPU Kota Pekanbaru juga mensosialisasikan Pemilu 2018 dengan cara tatap muka yaitu melalui pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat seperti, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Umum, Kepolisian, TNI dan Media (dalam berbagai forum). Dan juga KPU Kota Pekanbaru tidak membentuk tim relasi (relawan demokrasi) seperti yang dikatakan oleh Ibu Dra. Yelli Nofiza selaku anggota KPU Kota Pekanbaru, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, relasi itu sendiri yang merupakan badan organisasi strategis untuk dibentuk.

Dan sosialisasi juga bisa dibantu oleh peran dari relasi (relawan demokrasi) juga merupakan faktor pendorong kualitas partisipasi politik dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. relasi ini melibatkan peran masyarakat

yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Disini peranan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih melalui sosialisasi yang diberikan. Hal ini tentunya akan berdampak dengan berkurangnya jumlah masyarakat yang tidak memilih di Pemilu 2018 ini. Strategi untuk meningkatkan angka partisipasi yang diterapkan selama ini belum berdampak secara signifikan untuk menekan angka golput. Dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah golput dari periode ke periode selanjutnya di tingkat nasional dan pada pemilihan di tahun 2018. KPU Kota Pekanbaru dalam hal ini harus memberikan perhatian lebih agar beberapa alasan diatas tidak sampai terjadi sehingga tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat semakin baik.

Sosialisasi KPU Kota Pekanbaru berjalan selama 1 tahun lebih kurang, dan mengapa partisipasi masyarakat masih saja rendah, 1 tahun pelaksanaan sosialisasi KPU Kota Pekanbaru adalah jangka waktu yang lama. Selain itu juga sasaran sosialisasi KPU Kota Pekanbaru meliputi komponen pemilih berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, masyarakat umum, bisa dilihat bahwa sasaran sosialisasi KPU Kota Pekanbaru sangat banyak yang harus di sosialisasikan menjadi agenda rutinitas mereka ketika menjelang Pemilu.

Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Disisi lain Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut secara hierarki dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga dalam lingkup kabupaten/kota maka tugas untuk membangun kesadaran politik masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota salah satunya seperti tugas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk padat yang hampir kurang lebih 500.000 penduduk dengan adanya perubahan masyarakat yang sebisa mungkin untuk menggunakan partisipasi politik sebaik mungkin untuk

mengurangi angka golput, permasalahan angka partisipasi masyarakat semakin bertambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi pada pemilu pilkada untuk menentukan kepala daerahnya. Pemilu ini harus di sosialisasikan dengan baik oleh KPU Kota Pekanbaru berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah seluas 632,26 km<sup>2</sup>, yang memiliki berbagai suku dan etnis dari berbagai pelosok negeri. KPU Kota Pekanbaru mempunyai tugas menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menaikkan angka Partisipasi politik dari tahun ketahun setiap pemilu pilkada yang ada, dengan jumlah 523.416 jiwa masyarakat kota pekanbaru dengan kepadatan 1.655/km<sup>2</sup>.

Dapat dilihat Kondisi kota Pekanbaru yang dimana angka partisipasi politiknya selalu cenderung menurun, sebagaimana fungsi tugas kewajiban dan wewenang KPU Kota Pekanbaru dalam menyosialisasikan kepada msyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa indikasi atau fenomena yang terkait dengan bagaimana Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam mengatasi penurunan angka partisipasi masyarakat di pekanbaru, diantaranya:

1. Terindikasi Rendahnya Partisipasi Masyarakat pada pemilihan kepala daerah Provinsi Riau Tahun 2018 terkhusus di Kota Pekanbaru.
2. Terindikasi Tidak Terbentuknya Relawan Demokrasi (Relasi) Pada Pilkada 2018, Sehingga Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tidak Berjalan dengan Maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana **Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) ?**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pada Pilkada Provinsi Riau 2018 di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara empiris sebagai bahan masukan untuk meningkatkan Strategi Komisi Pemilihan Umum kota pekanbaru dalam upaya memperoleh angka partisipasi masyarakat yang baik dikota Pekanbaru.
- c. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis mengemukakan beberapa konsep teori yang diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian yang penulis anggap relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat/dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas), (Syafiee 2001:20)

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pem” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiee 2011:5).

Menurut Napitupulu (2012:9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan

adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Syafiie (2011:10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta sudah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Rasyid (Muhadam 2010:34) dalam Pemerintahan Modern Rasyid Membagi fungsi Pemerintahan menjadi empat bagian yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan (*public servic*);
- b. Pembangunan (*development*);
- c. Pemberdayaan (*empowering*) dan;
- d. Pengaturan (*regulation*).

Menurut U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukan cara kerja kendala dan keluar struktur dalam proses pemerintahan yang umum, (Syafiie 2001:20).

Pemerintahan adalah suatu organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harfan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahwa warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya (Ndraha 2011:6).

## 2. Konsep Lembaga Negara Independen

Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga *trias politica* mengalami perkembangan pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi, seperti Amerika Serikat dan Perancis. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga-lembaga baru tersebut, di antaranya adalah *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang. Istilah “lembaga negara independen” merupakan yang paling umum digunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaga negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut.

Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut ornop (organisasi non-pemerintah) atau NGO (*non-governmental organization*). Lembaga negara independen ini sekilas memang menyerupai NGO karena berada di luar struktur pemerintahan eksekutif. Akan tetapi, keberadaannya yang bersifat publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik, membuatnya tidak dapat disebut sebagai NGO dalam arti sebenarnya.

Secara teoritis, lembaga negara independen bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.

### 3. Konsep Organisasi

Menurut James D. mooney (Dalam Hasibuan, 2009:120) organisasi adalah setiap bentuk berserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Pradjudi (Dalam Hasibuan 2009:121) Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Aspek-aspek penting dari definisi-definisi di atas adalah:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
2. Adanya system kerja sama yang terstruktur dari sekelompok orang
3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan.
4. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
5. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus di taati
6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas
7. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi

8. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi.

Arnard (Dalam Thoha,2011:167) menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu system kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.

Sutarto (Dalam Syamsir,2013:25) bahwa organisasi adalah perbuatan atau proses yang menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saing berhubungan dari bagian menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.

Dari beberapa teori di atas, dapat dikatakan bahwa organisasi memiliki beberapa variable yaitu: (Dalam Syamsir 2013:26)

1. Taksonomi organisasi
2. Struktur organisasi
3. Proses dalam organisasi, dan
4. Individu dalam organisasi

Secara sadar ataupun tidak, manusia telah melakukan kegiatan organisasi yang mana adanya perilaku serta tindakan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup tanpa bantuan kerjasama dari orang lain. Organisasi merupakan wadah dalam menjalankan kegiatan administrasi dan manajemen.

Selain itu, teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi, di antaranya adalah membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsinya dan mengaktualisasikan visi misi organisasi tersebut.

#### 4. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari kata Yunani, yaitu *strategos* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Dalam Satrio, 2018: 22).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

- a. Pengertian umum Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.
- b. Pengertian khusus Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (Dalam Dwi, 2019: 6).

Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi Chandler (Dalam Dwi, 2019: 6) tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang

maksimal pada Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pemilukada, Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilukada kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain sebagai berikut:

#### 1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

#### 2. Pemilihan Tindakan

Keputusan adalah suatu proses yang terus menerus (*continue*), sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut maka keputusan itu tidak mempunyai arti.

Sifat daripada pengambilan keputusan ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu yang dapat dibagi menjadi :

1. Pertimbangan waktu yang lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan.
2. Waktu sekarang di mana keputusan itu dibuat.
3. Waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan, dan diadakan penilaian.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (Dalam Dwi, 2019: 7) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

### 3. Keterbatasan Sumber daya

Alokasi sumber daya adalah suatu rencana untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, contohnya sumber daya manusia, khususnya dalam jangka waktu dekat, untuk meraih tujuan untuk masa depan. Ini adalah suatu proses dari alokasi sumber daya yang langka diantara berbagai proyek atau unit

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

Strategi juga digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Dalam Tohap, 2019: 28). Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (Dalam Tohap, 2019: 28).

Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan

yang diinginkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. KPU Kota Pekanbaru melakukan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 2018 melalui pelaksanaan sosialisasi langsung pada masyarakat. Sebab partisipasi masyarakat dalam memilih ini sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan pilkada ditambah lagi masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pendidikan politik ini sehingga dituntut ekstra untuk memberikan pengetahuan dan mensosialisasikan terkait kepemiluan ini.

Salah satu tugas KPU Kota Pekanbaru adalah jangan sampai ada pemilih yang terhambat haknya untuk berpartisipasi dalam pilkada akibat tidak memahami prosedur tentang bagaimana cara masyarakat atau pemilih untuk berpartisipasi atau tidak golput dalam pemilihan. Walaupun KPU Kota Pekanbaru sangat menyadari bahwa ada keterbatasan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilihan tersebut, sehingga dukungan dari banyak pihak sangatlah dibutuhkan. Untuk itu strategi begitu penting digunakan dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (Dalam Sri 2018: 10) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*. Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan Hunger (Dalam Sri 2018: 10) mengenal tiga tingkatan strategi saja, yang didalamnya *corporate strategy* sudah mencakup *enterprise strategy*.

a. *Enterprise strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntunan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

b. *Corporate strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategy yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, Para pengusaha, Para anggota legislatif, Para donor, Para politisi, Dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

d. *Functional strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
2. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, refresenting dan integrating.
3. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, Koteen (Dalam Sri 2018: 10) sesungguhnya tidak berbeda pandangan dengan Higgins, Wheelen dan Hunger, meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklasifikasikan strategi

itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Corporate strategy* (strategi organisasi).

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.

2. *Program strategy* (strategi program).

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.

3. *Resource support strategy* (strategi pendukung sumber daya).

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. *Institutional strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

## **5. Konsep Manajemen Strategi**

Menurut Nuryadin (Dalam Tohap, 2019: 31), “Manajemen strategi adalah proses pengarahannya perencanaan strategi dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang”. Menurut Jorfi, Yacob, dan Shah (Dalam Tohap, 2019: 31) Manajemen strategis merupakan salah satu mata pelajaran yang sedang dibahas dan semakin menarik bidang manajemen pembangunan. Manajemen strategis adalah pendekatan sistematis yang utama dan bertanggung jawab penting dari

manajemen umum untuk posisi dan berhubungan organisasi dengan lingkungannya dalam cara yang akan memastikan kesuksesan dan membuatnya aman dari kejutan. Manajemen strategi memegang peran penting dalam organisasi untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif.

Makna dari Manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi menurut Yunus (Dalam Tohap, 2019: 31):

1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
3. Memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
4. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

#### **6. Konsep Sosialisasi**

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dihayati oleh masyarakat, sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi serta suatu usaha untuk memberikan informasi tentang kabar atau berita. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*), apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut.

Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Melalui sosialisasi para generasi masyarakat dapat belajar tentang bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku dalam kondisi sosial tertentu ketika berhubungan dengan orang lain. Kegagalan sosialisasi akan berdampak pada berbagai gangguan yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Artinya realitas sosial yang tertib merupakan syarat utama kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sosialisasi tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam usaha kelangsungan hidupnya. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya.

Menurut David A. Goslin (Dalam Melisa, 2018: 7) berpendapat “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

### 1. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik juga merupakan suatu proses bagaimana cara memperkenalkan system politik pada seseorang individu atau sekelompok masyarakat, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sedangkan menurut Syarial (Dalam

Melisa, 2018: 8) sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

## 2. Fungsi Sosialisasi Politik

Adapun fungsi sosialisasi politik menurut Apter (Dalam Dedi, 2019: 5) ada tiga fase, yaitu :

1. Fungsi sosialisasi sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat yang bersifat politik, dalam artian orang-orang dewasa adalah warga negara yang mengutarakan sikap mengenai masyarakat, atau rasa suka atau bencinya mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik dan menanggapi isu-isu yang mempengaruhi mereka.
2. Fungsi sosialisasi, bagaimana orientasi politik digeneralisasi oleh masyarakat menghadapi situasi-situasi kelompok diluar keluarga. Kaidah-kaidah kehidupan politik dipegang dalam interaksi bermain maupun instruksi formal.
3. Fungsi sosialisasi mempengaruhi sosialisasi melalui partisipasi. Partisipasi membutuhkan penanaman energi psikis karna kepribadian sosial seseorang ditentukan dalam hubungan dengan orang lain, citra diri seseorang sangat bergantung kepada pemilihan pribadi-pribadi yang bernilai positif. Jadi secara sederhana fungsi sosialisasi adalah untuk mengetahui tentang hal-hal yang bersifat terbuka dalam konteks partisipasi dalam pemilu untuk ikutserta dalam menentukan pilihan.

Jadi secara sederhana fungsi sosialisasi politik untuk mengetahui tentang hal-hal yang bersifat terbuka dalam konteks berpartisipasi dalam pemilu untuk ikutserta dalam menentukan pilihannya.

## 7. Konsep Komunikasi

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Salah satu unsur terpenting dalam hidup manusia adalah

komunikasi. Komunikasi adalah saluran atau media. Seorang komunikator dalam proses komunikasi pastilah menggunakan unsur media sebagai alat penyampai pesan kepada komunikan Tujuannya untuk mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media atau saluran. Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam kehidupan manusia, sebab manusia perlu mempertahankan hidup dan kebutuhan menyesuaikan dengan lingkungan.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu "*Communicare*" yang berarti "Memberitahukan". Sedangkan menurut bahasa inggris adalah "*Coomon*", dari kata dasar tersebut kemudian menjadi "*Communication*" yang artinya adalah "suatu pertukaran informasi, konsep, ide, perasaan lain-lain antara pihak dua atau lebih." Menurut Sumpriana (Dalam Eka, 2014: 26).

Menurut Andrew E. Sirkula (Dalam Eka, 2014: 26) mendefinisikan bahwa : "komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian dan pemahaman seseorang, suatu tempat atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau prang lain".

### 1. Komunikasi Politik

Komunikaasi politik merupakan suatu bidang yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau pengaruh terhadap perilaku politik (efek).

Dalam Komunikasi Politik karangan Hafied Cangara, Meadow (Dalam Noor, 2019: 6) membuat definisi komunikasi politik lebih menekankan kepada simbol-simbol atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik. Sedangkan Nimmo sendiri yang mengutip Meadow hanya menekankan bahwa komunikasi politik, yaitu (kegiatan) yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi konflik. Selain itu Nimmo juga mengaitkan Komunikasi Politik juga erat berhubungan dengan opini publik.

## 2. Unsur-Unsur Dalam Komunikasi Politik

Seperti halnya dengan disiplin Komunikasi lainnya, maka komunikasi politik merupakan sebagai Body of Knowledge juga yang terdiri dari berbagai unsur yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek, berikut adalah unsur-unsur komunikasi politik serta penjelasannya :

### a. Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberikan informasi tentang hal yang mengandung makna atau bobot politik, semisal Presiden, Menteri, anggota DPR, MPR, KPU, Politisi, fungsionaris Partai Politik, LSM dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalanya pemerintahan.

## b. Pesan Politik

Ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang terangan, baik disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang – undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita, surat kabar, radio, televisi, internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk/baliho, iklan politik atau propaganda, perang urat syaraf (psywar), warna logo, warna baju, warna bendera, bahasa tubuh (body language), dan semacamnya.

## c. Saluran Atau Media Politik

Ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya Media Cetak ; Surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media Elektronik ; Film, radio, televisi, komputer, video, internet. Media Format Kecil ; Leaflet, brosur, selebran, stiker, bulletin. Media Luar Ruang (outdoor media); Baliho, spanduk, reklame, kaos, pin, logo, bendera, electronic board, topi, iklan mobil, Iklan gerbong kereta, kalender, sampul buku, payung dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membangun citra (Image Building). Saluran Komunikasi Kelompok ; Partai Politik (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC) , organisai profesi, ikatan alumni, organisasi sosial, keagamaan, karang taruna dan semacamnya. Saluran Komunikasi Publik Stadion, aula, balai desa, alun alun, panggung kesenian.

Saluran Komunikasi Sosial ; Pertunjukan wayang, Pesta Rakyat, pesta tani , dan sebagainya.

#### d. Sasaran Atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk dukungan suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah semua kalangan masyarakat warga negara yang mempunyai hak pilih dan siswa warga negara yang akan menjadi calon pemilih dengan ketentuan cukup umur untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

#### e. Pengaruh Dan Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sampai tingkat DPRD.

### 3. Fungsi Komunikasi Politik

Sebagai disiplin ilmu fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh McNair

(Dalam Noor, 2019: 7), maka komunikasi akan berfungsi untuk :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat.

2. Melakukan sosialisai mengenai kebijakan, program dan tujuan lembaga politik.
3. Memberikan motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai.
4. Menjadi platform yang dapat menampung ide-ide yang dikemukakan masyarakat, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan tata cara penggunaan hak pilih mereka sebagai pemberi suara.
6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan para juru kampanye, artis, para komentator atau pengamat politik.
7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari kofilk dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional.
8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi.
9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar-komentar politik.
10. Menjadi Watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya good governance yang transparansi dan akuntabilitas.

### **8. Konsep Partisipasi**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Dalam Tohap, 2019: 34).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Dalam Tohap, 2019: 34).

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting demokrasi perwakilan di sebuah negara demokrasi. Sayangnya dalam setiap pelaksanaan pemilu selalu ada persoalan terkait partisipasi masyarakat (Dalam Sri, 2018: 15). Persoalan itu tidak banyak diungkap, bahkan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.

Sebagian masyarakat masih melihat pemilu sebagai ajang pencapaian kekuasaan semata dan tak memberi manfaat untuk perbaikan kedepan. Sebagian menilai para calon anggota legislatif suka mengumbar janji yang tidak dipenuhi. Akibatnya, pada pelaksanaan pemilu, masyarakat kurang peduli karena menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu dan tidak mempunyai manfaat. Masyarakat yang apatis berpandangan bahwa siapa pun yang bakal terpilih menjadi anggota legislatif tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap hidupnya. Selain itu, ada kelompok yang berpandangan bahwa calon anggota legislatif itu-itu saja, kalau calon itu terpilih, maka akan sama saja dengan sebelumnya. Sebagian penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran dalam melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat termarginalkan.

Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Peserta pemilu pada pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih pada saat pencoblosan. Meskipun dalam pelaksanaannya, banyak sekali masalah masalah yang ada di dalamnya. Diantaranya yaitu partisipasi masyarakat yang selalu mengalami pasang surut. sudah dijelaskan bahwasanya penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan umum nasional yang diikuti penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah akan menjadi berita buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang. Partisipasi politik dalam pemilu adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Dengan demikian partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (Dalam Sri, 2018: 15),”bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”.

Michael Rush dan Althoff (Dalam Sri, 2018: 15) mengidentifikasi:bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. mencari jabatan politik atau administrasi.
- c. mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- d. menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.

- e. menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Dalam sistem perwakilan, keterlibatan warga negara harus dapat membantu meyakinkan bahwa aparaturnya bersikap responsif terhadap ketentuan dan tuntutan yang terdapat di antara sebagian besar warga negara. Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara yang telah dikembangkan yakni teori elitis dan partisipatori:

1. Pendekatan elitis, menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu metode pembuatan keputusan yang mengokohkan efisiensi dalam administrasi dan pembuatan kebijaksanaan namun menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa dan kaum elit terhadap pendapat umum.
2. Pendekatan partisipatori, keterlibatan yang lebih tinggi, karena sangat diperlukan untuk mendatangkan keuntungan seperti ini kita harus menegakkan kembali demokrasi langsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menerjemahkan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan perorangan dan atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilu. (Dalam Sri, 2018: 17)

KPU dalam mendorong partisipasi masyarakat melakukan pemetaan program peningkatan partisipasi melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

### 1. Sosialisasi informasi pemilu

Tujuannya untuk penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan dan mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilitas sosial, media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya memudahkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan dengan baik.

### 2. Pendidikan Politik

Tujuan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan penjangkaran sosial, media lokal, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 55) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Dengan demikian, pendidikan politik menurut Alfian sama dengan sosialisasi politik, yaitu proses menyampaikan atau menyebarkan program-program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik. Senada dengan Alfian, Wahab (Dalam Tohap 2019: 37) mengemukakan, bahwa pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 3. Keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu

Bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pemilu antar lain dengan cara keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan keterlibatan dalam tahapan pemilu dan keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Menurut Rahman (Dalam Sri, 2018: 15), tipologi partisipasi politik yaitu:

1. Partisipasi Aktif adalah partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi Pasif adalah partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan Putih (Golput) adalah sekelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

### 9. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, sedangkan lembaga negara utama disebut pula main state organ.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun tahun 1999 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru.

#### **10. Pengertian Pilkada**

Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat, pemilihan kepala daerah dilakukan bersamaan dengan wakil kepala daerah. Dimana kepala daerah diantaranya Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk Kabupaten dan Walikota untuk Kota. (Dalam Sri, 2018: 16)

Dalam sejarah sistem perekrutan ataupun pemilihan kepala daerah sejak indonesia merdeka, kita sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dari semua aturan yang dibuat tersebut dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya (Dalam Sri, 2018: 16). Periode dan sistem pemilihan tersebut dapat dibedakan atas tiga bagian yakni sebagai berikut:

1. Periode penunjuk Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
3. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota.

## B. Penelitian Terdahulu

Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (jurnal) diantaranya :

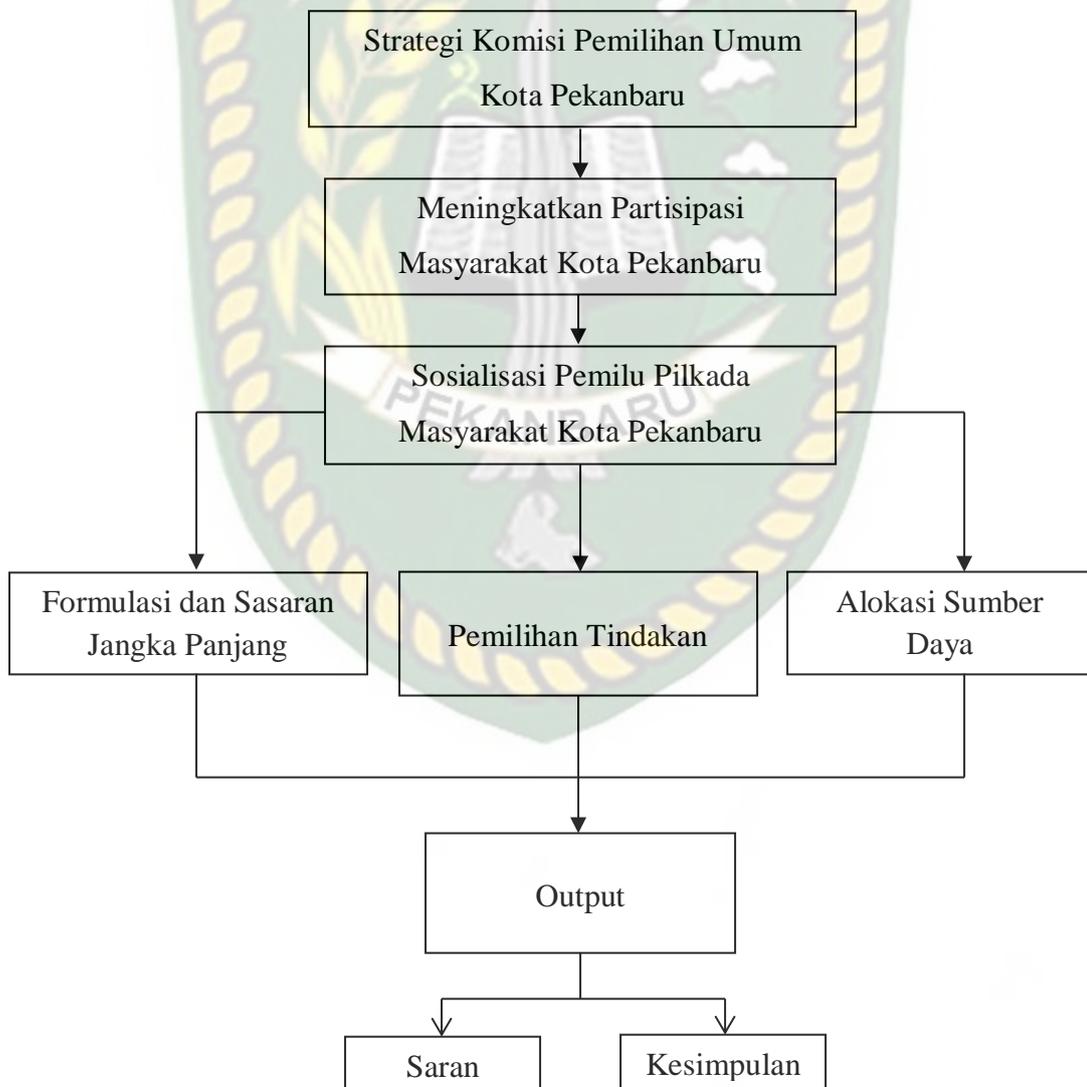
**TABEL II.1 : Pendekatan Jurnal Penelitian Terdahulu.**

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Fitri Andriani. Universitas Andalas, Padang, Indonesia	Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilwako Tahun 2017	Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angkat Partisipasi	Meningkatkan Partipasi Pemilih Pilwako, Indikator Yang Ditetapkan
2	Dwi Ardiani. Universitas Padjajaran	Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi	Sosialisasi Untuk Meningkatkan Angka Partisipasi, Teori Chandler	Pemilu Pilkada Jawa Timur, Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas
3	Samsu Bahri. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau	Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran Ke Dua Di Kota Pekanbaru Tahun 2013	Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2013

### C. Kerangka Pikir

Adapun Kerangka Pikir terkait dengan proposal penelitian skripsi dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018”. Penulis sajikan seperti pada gambar berikut :

**Gambar II. 1 : Pedoman Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Pekanbaru**



#### D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
2. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.
3. lembaga Negara independen adalah lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Seperti lembaga Negara penunjang atau lembaga Negara independen disebut pula auxiliary state body, sedangkan lembaga Negara utama disebut pula main state organ.
4. Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
5. Managemen Strategi adalah proses pengarahan usaha perencanaan strategi dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang

6. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (social control), apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut
7. Komunikasi Proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersamaan dan pertalian antara peserta dalam proses informasi
8. Komisi Pemelihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.
9. Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat, pemilihan kepala daerah dilakukan bersamaan dengan wakil kepala daerah. Dimana kepala daerah diantaranya Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk Kabupaten dan Walikota untuk Kota.
10. Partisipasi Masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.
11. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Provinsi Riau, Terkhusus Kota Pekanbaru.

### E. Operasionalisasi Variable

Untuk lebih jelasnya mengenai operasional variabel mengenai Penyelenggaraan Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat di Kota pekanbaru pada tabel di bawah ini:

**Tabel. II. 2 : Operasional Variabel Pedoman Pelaksanaan Dalam Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Pilkada, Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu Pilkada kepada masyarakat. Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (Dalam Dwi 2019: 6). Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal.	Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Pilgub di Kota Pekanbaru	Formulasi dan sasaran jangka panjang	Mencari adanya kejelasan perencanaan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum tentang pendidikan politik, melalui penjangkaran sosial, dan pembentukan relawan demokrasi kepemiluan
		Pemilihan tindakan	Adanya jadwal pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum kepada sekmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya.
		Alokasi sumber daya	KPU melakukan bimbingan teknis kepada panitia penyelenggara Pemilu

Sumber : Olahan Penulis 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian "*Kualitatif*". Metode penelitian "*Kualitatif*" adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang cocok menggunakan analisis, proses, dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai dasar serta pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini berarti objek dan tujuannya sudah ditetapkan sehingga mempermudah bagi penulis dalam melakukan penelitian penulis. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam Pemerintahan. Untuk memperolehnya data primer, lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek diteliti untuk memperoleh data

atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka penetapan situs penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di jalan Arifin Ahmad No. 39.

### **C. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli. Menurut Spradley (Moleong, 2004: 165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan teknik *key person*. Teknik memperoleh informan penelitian seperti itu digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. *Key person* ini adalah tokoh formal maupun tokoh informal. (Bungin, 2007: 77)

Untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dipilih karena informan yang diambil memiliki tokoh tertentu, pemilihan informan berdasarkan penelitian.

**Tabel III. 1 : Key Informan dan Informan**

No	Nama	Jabatan	Key Informan	Informan	Ket
1	Anton Merciyanto, S.Si	Ketua (Divisi Keuangan Umum, Logistik Dan Rumah Tangga)	1		-
2	Dra. Yelli Nofiza, M.M	Anggota (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM)		1	-
3	Panitia Penyelenggara Pemilu	PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan)		2	-
4	Masyarakat Umum	Masyarakat Kota Pekanbaru		4	Masyarakat Kota Pekanbaru

*Key Informan* yang digunakan penulis ialah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Informan Utama dalam penelitian ialah Dra. Yelli Nofiza, M.M selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan Informasi. Panitia Penyelenggara Pemilu sebagai informan dan juga Informan Tambahan dalam penelitian ini ialah Masyarakat Kota Pekanbaru.

Alasan peneliti mengambil Ketua KPU Dan Dra. Yelli Nofiza, M.M selaku Anggota KPU Kota Pekanbaru Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan Informasi KPU Kota Pekanbaru sebagai informan karena mereka merupakan *stakholder* (pemangku kepentingan) berperan terhadap

Sosialisasi. Serta Panitia Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara dan Masyarakat Kota Pekanbaru yang berperan sebagai pemilih.

#### **D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan**

dalam Pemilihan Informan dan key informan ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat efektifitas dan efesiensi KPU Kota pekanbaru dalam meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat di Kota.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dalam memperoleh data dan Informasi yang baik, keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

##### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur -literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan

dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas, keadaan dan pelaksanaan KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di kontribusikan makna dalam tertentu.
3. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Menurut Gubs dan Lincoln (Moleong 2007:216) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen, sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

#### **G. Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yng diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta uraian dalam bentuk deskriptif.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.2 : Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Strategi Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru.**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020 /bulan/Minggu																			
		Januari- Februari				Maret- April				Mei- Juni				Juli- Agustus				September- Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■			■	■	■	■												
2	Seminar UP											■									
3	Revisi UP											■									
4	Rekomendasi survei											■									
5	Survei lapangan														■						
6	Analisis Data														■						
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Skripsi															■	■				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																		■		
	Ujian Komprehensif Skripsi																			■	■
10	Revisi Skripsi																				■
11	Pengadaan Skripsi																				■

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, yang luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km<sup>2</sup>), yang keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak diantara 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00"-105°05'00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dilaksanakan pada bulan Mei 2010. Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil olah cepat SP 2010 tercatat sebesar 5.543.031 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa dan 2.688.042 jiwa

penduduk perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.337.034 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Masih berdasarkan hasil olah cepat SP 2010, distribusi penduduk menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa atau sekitar 16,31 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176.371 jiwa. Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Dan berdasarkan data SP, jumlah penduduk Riau tahun 2009 diproyeksikan berjumlah 5.306.533 jiwa, yang terdiri dari 2.794.617 laki-laki dan 2.511.916 perempuan.

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak.

Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di

Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940- an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau. Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupa dan Bengkalis. Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

#### **B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E ayat (5) “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dan juga berdasarkan Kepres Nomor 16 tahun 1999 tanggal 19 Februari 1999, terbentuklah Komisi pemilihan Umum (KPU) yang pada waktu itu mempunyai nama lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada tahun 1999 Pemilu di Indonesia berubah, berdasarkan pada undangundang nomor 3 tahun 1999 terbentuklah Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan wakil partai peserta pemilu dan wakil pemerintah. Tiga hari setelah diundangkan paket undang-undang Politik 1 Februari 1999 menteri dalam negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum

dengan SK nomor 16 tahun 1999 membentuk Panitia Persiapan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) yang beranggotakan 11 orang terdiri dari pakar, tokoh masyarakat, dan aktivis yang memiliki reputasi dan integritas pribadi yang diakui oleh masyarakat dan bertugas melakukan seleksi atas partai politik peserta pemilu, mempersiapkan dokumen-dokumen berupa petunjuk pelaksana teknis Komisi Pemilihan Umum serta aturan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar tugas.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru terletak di salah satu Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai di Jl. Arifin Ahmad No.39. Salah satu Kecamatan yang jarak tempuh dari pusat kota memiliki jarak yang tidak terlalu jauh,

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemilihan Umum yang meliputi tanggung jawabnya sebagai penyelenggara berjalannya pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistemasan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

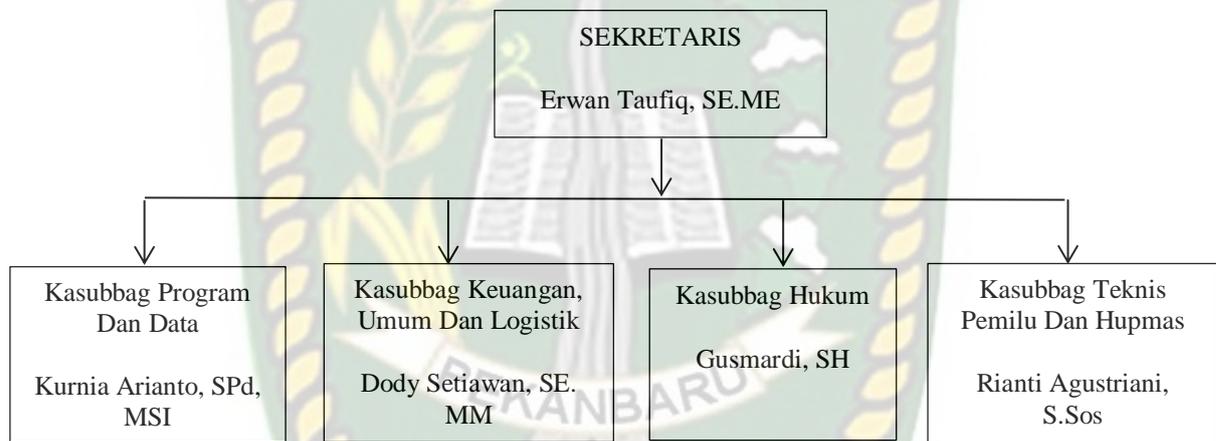
Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus bersifat profesional, mandiri, dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, Visi “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan capaian untuk menjalankan visi tersebut maka adapun misi yang sebagai dari pada fungsi berjalannya visi tersebut, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum harus memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilu, adapun misi tersebut juga sudah tercantum dalam misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

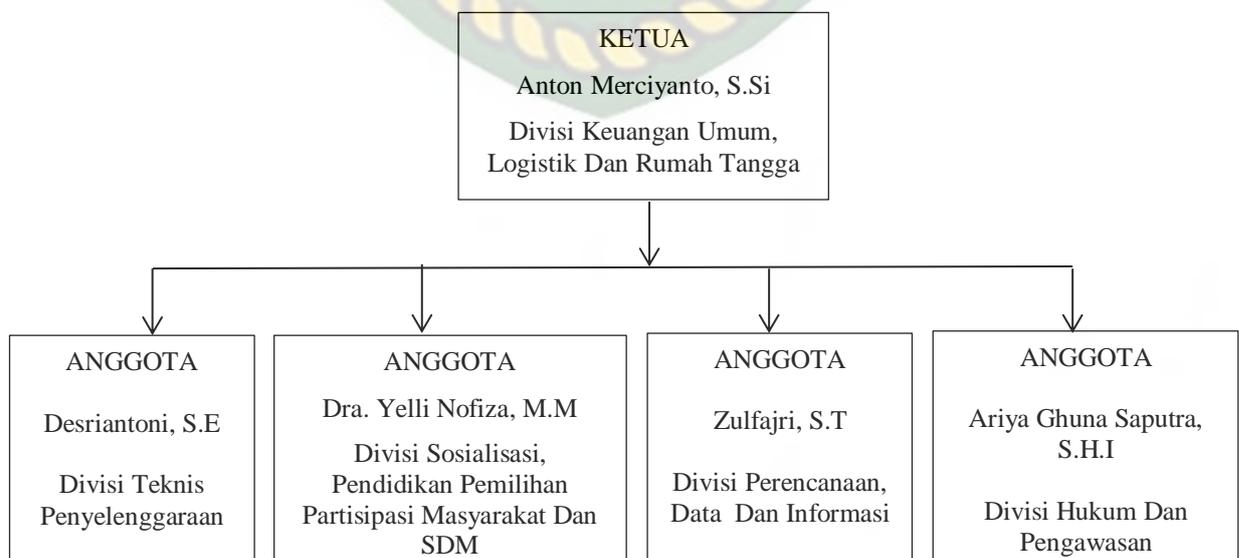
### C. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Struktur organisasi dalam suatu lembaga instansi memiliki peranan yang penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota ataupun kepala sub bagian, dimana setiap anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan yang terlebih dengan penuh tanggung jawab.

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru periode 2019-2024.**



**Gambar IV.2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru periode 2019-2024.**



#### **D. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

##### **a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru**

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD meliputi:

- Merencanakan program dan menjabarkan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya.
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK.
- Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- Menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- Menonaktifkan sementara dan mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Pawanslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan Undang-Undang.

#### b. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam.
- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU.
- Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

#### c. Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

##### 1. Tugas Sekretariat Kota Pekanbaru

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- Memberikan dukungan teknis administratif.
- Membantu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- Membantu pemetusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- Membantu penyusunan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Wewenang Sekretariat Kota Pekanbaru

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.

- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada point sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

### 4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- Sub. Bagian Program dan Data
  - Sub. Bagian Hukum
  - Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Humas
  - Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
- a. Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.
  - b. Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan

dengan pemilu dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.

- c. Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- d. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.

#### **E. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindahke tempat pemukimana baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai siak.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selajutnya diperigati sebagai hari lahir kota pekanbaru. Mulai saat ini

sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekanbaru”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Kota Pekanbaru terletak di antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota pekanbaru diperluas dari 62,96 Km menjadi 446,50 Km, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota pekanbaru adalah 632,26 Km. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatnya oula tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk kecamatan baru dengan perda kota pekanbaru no.4 tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan/desa baru dengan perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa. Kota pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di provinsi riau sekaligus inu kota provinsi. Pada sensus penduduk tahun 2010, penduduk di kota pekanbaru mencapai 850.000 jiwa. Laju perkembangan ekonomi dikota pekanbaru memacu

pertambahan penduduk mencapai 71 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 1.429,6/km.

**Tabel IV.1. Data Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2014.**

No	Kecamatan/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	100.656	93.675	194.331
2	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
3	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
4	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
5	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
6	Limapuluh	21.819	22.163	43.982
7	Sail	11.464	11.492	22.956
8	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
9	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
10	Senapelan	18.819	19.364	38.183
11	Rumbai	3.722	36.011	73.231
12	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	7.297
13	Pekanbaru	519.515	491.952	1.011.467
	Jumlah	1.005.532	983.904	1.957.261

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Karakteristik Key Informan dan Informan

Deskripsi identitas key informan dan informan merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian mengenai “**Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**”. Deskripsi identitas key informan dan informan dibagi menjadi 4 bagian yakni nama, jenis kelamin, umur, dan jabatan/keterangan.

**Tabel. V.1 Identitas Key Informan dan Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan dan Keterangan
1.	Anton Merciyanto, S.Si	Laki-laki	42	S.1	Ketua KPU Kota Pekanbaru
2.	Dra. Yelli Nofiza, M.M	Perempuan	38	S.2	Anggota KPU Kota Pekanbaru. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Irsyat Hasan	Laki-laki	54	SMA	PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) Kecamatan Senapelan
4.	Herman Susilo	Laki-laki	42	SMA	PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) Kecamatan Lima Puluh
5.	Heri Darsono	Laki-laki	39	SMA	Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki
6.	Jaya	Laki-laki	52	SMA	Masyarakat Kecamatan Lima Puluh
7.	Doni Putra	Laki-laki	44	SMA	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota
8.	Yusrizal	Laki-laki	34	SMA	Masyarakat Kecamatan Senapelan

Sumber: Olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan 2020

Dari tabel di atas yang menjadi Key Informan dalam penelitian adalah Bapak Anton Merciyanto, S.Si selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Kota Pekanbaru sebagai daerah yang sudah melaksanakan Pemilu Pilkada Gubernur Riau Tahun 2018. Dan yang menjadi Informan dalam penelitian adalah Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M selaku Anggota KPU Kota Pekanbaru (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM), PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan), dan Masyarakat setempat Kota Pekanbaru dengan adanya Informan di atas merupakan acuan upaya strategi KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih seperti apa pelaksanaannya di Kota Pekanbaru yang partisipasinya rendah.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan oleh peneliti di atas, Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai key informan merupan responden yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan segala informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan indikator peneliti gunakan, dan Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M selaku Anggota KPU Kota Pekanbaru (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM), juga merupakan hal penting untuk memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M menjadi peran penting arah sosialisasi KPU Kota Pekanbaru dan mengetahui segala permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih Kota Pekanbaru, demikian juga dalam informan penelitian ini agar mampu memberikan temuan sosialisasi KPU bagaimana keterlibatan KPU Kota Pekanbaru terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih Kota Pekanbaru.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kota Pekanbaru).**

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018. Penelitian ini memfokuskan pada tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada Gubernur Provinsi Riau tekhusus Kota Pekanbaru. Tingkat partisipasi Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru berada di urutan nomor 3 di Provinsi Riau. Peneliti mendapatkan data dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai beberapa responden di antaranya yaitu Bapak Anton Merciyanto, S.Si selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M selaku Anggota KPU Kota Pekanbaru (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM), PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan), dan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat Kota Pekanbaru tentu perlu formulasi tepat saran dan strategi tahapan sosialisasi yang efektif dan efisien agar tujuan strategi digunakan tepat pada tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Agar tujuan strategi KPU Kota Pekanbaru tepat pada sasaran tentu perlu koordinasi stackholder atau pemangku jabatan seperti pemerintah daerah Kota Pekanbaru, dan konsolidasi kelompok-kelompok masyarakat agar bekerja sama.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang didapatkan berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria

peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Narasumber yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan terlibat tentang Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018. Dimana terdapat 1 *Key Informan* dan beberapa *Informan*.

Hasil observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat pada KPU Kota Pekanbaru, PPK, Masyarakat Kota Pekanbaru.

Wawancara merupakan proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan narasumber mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian. Wawancara memfokuskan dan menanyakan upaya Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018.

Adapun subjek dari penelitian ini yang disajikan narasumber atau Key Informan adalah Bapak Anton Merciyanto, S.Si selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Indikator yang telah dibuat peneliti tentang Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018, berdasarkan indikator variabel penelitian yang ada di antaranya adalah :

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang
2. Pemilihan tindakan
3. Alokasi sumber daya

## 1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dengan hal ini pelaksanaan formulasi dan sasaran jangka panjang yang tepat sangat penting untuk merencanakan tahapan dan program yang akan dilakukan KPU Kota Pekanbaru dalam proses sosialisasi agar partisipasi pemilih meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Perlu adanya program yang mendukung dan keterkaitan dengan sosialisasi masyarakat yang berkelanjutan, hal ini bisa dilakukan dari semua kelompok masyarakat seperti relawan demokrasi, serta tokoh masyarakat. Tahapan dan program berkelanjutan ini sudah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2018 untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru.

Dengan dilakukannya tahapan program-program sosialisasi ini diharapkan KPU Kota Pekanbaru dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Anton Merciyanto, S.Si selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pada pukul

09.30 WIB di Kantor KPU Kota Pekanbaru. Menanyakan apa saja program dan metode yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih kota Pekanbaru. Bapak Anton Merciyanto, S.Si mengatakan bahwa :

“Perencanaan program sosialisasi pemilukada kepada masyarakat serta memberikan informasi tentang tahapan, jadwal, dll. Metode yang akan kami lakukan yaitu dengan komunikasi secara tatap muka dan pemanfaatan media massa.”

Bapak Anton Merciyanto, S.Si mengatakan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru berkelanjutan sampai pada waktu yang sudah ditentukan, Bapak Anton Merciyanto, S.Si mengatakan :

“KPU Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkelanjutan, waktu yang ditetapkan selama 1 tahun lebih sosialisasi kepada masyarakat menjelang pemilu pilkada pada tahun 2018.”

Bapak Anton Merciyanto, S.Si juga mengatakan adanya hambatan dalam faktor finansial sosialisasi yang berkelanjutan :

“KPU dalam tahapan sosialisasi ini mendapatkan kendala seperti anggaran sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah yang masih belum seimbang dengan jumlah penduduk serta luas wilayah Kota Pekanbaru sehingga pada tahapan formulasi program sosialisasi KPU belum bisa mengkaver secara keseluruhan tindakan yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi pemilukada, tetapi KPU hanya memilih beberapa alternatif tindakan yang dianggap paling penting dan urgen.”

Bapak Anton Merciyanto, S.Si mengatakan, dalam menyampaikan sosialisasi masyarakat KPU Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran, Bapak Anton Merciyanto, S.Si mengatakan :

“KPU Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran, KPU melakukan sasaran sosialisasi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat umum”.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M selaku Anggota KPU Kota Pekanbaru, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 13.10 WIB di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Menanyakan hal yang sama dalam indikator formulasi dan sasaran jangka panjang bagaimana program dan metode sosialisasi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat. Dan Ibu Yelli Nofiza, M.M mengatakan bahwa :

“Program sosialisasi sudah kami bentuk sebaik mungkin, dan metode yang kami gunakan juga berupa tatap muka, agar masyarakat lebih mudah mengerti dengan persoalan pemilu pada tahun 2018. Selain itu mungkin ada beberapa faktor penghambat lain yang membuat partisipasi di Kota Pekanbaru kurang antusias. Ini suatu bahan evaluasi yang KPU lakukan”.

Peneliti kemudian menanyakan apakah KPU Kota Pekanbaru sudah membentuk relawan demokrasi dalam mempermudah sosialisasi ke masyarakat, Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M mengatakan :

“Pembentukan relawan demokrasi memang tidak dibentuk pada pilkada gubernur riau 2018 karena keterbatasan anggaran, maka dari itu relawan demokrasi tidak terbentuk.”

Peneliti Kemudian mewawancarai salah satu anggota PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) yaitu Bapak Irsyat Hasan dilakukan pada hari selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 13.00 WIB di kediaman rumahnya, peneliti menanyakan apa saja metode panitia penyelenggara kecamatan lakukan dalam sosialisasi pendidikan partisipasi pemilih Bapak Irsyat Hasan mengatakan :

“Metode yang akan kami lakukan yaitu berupa tatap muka dan pemanfaatan media massa, pelaksanaannya berupa mengadakan seminar kekampus-kampus ,forum warga, masyarakat umum dan lain-lain.”

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara ke Masyarakat umum yaitu Bapak yusrizal salah satu masyarakat Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020, peneliti menanyakan seperti apa sosialisasi yang KPU berikan kepada masyarakat, Bapak yusrizal mengatakan bahwa:

“Sosialisasi cukup mudah untuk dimengerti, dan sosialisasi yang diberikan berupa forum warga berbasis keluarga, masyarakat dengan bebas menanyakan apa saja kendala ataupun pertanyaan seputaran tentang pemilu pilkada ini, forum warga yang berupa tatap muka mudah dimengerti”

Peneliti menanyakan hal yang sama pula kepada masyarakat Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru pada Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2020, Bapak Jaya mengatakan bahwa :

“saya tidak mendapatkan sosialisasi dari KPU, dan saya tidak ikut mencoblos pada pemilu pilkada.”

Bapak Jaya juga mengatakan akan sibuk dengan pekerjaannya :

“saya seorang kapten kapal dipelabuhan, jadi info mengenai pemilu jarang kami dengar”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa program dan metode sosialisasi masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan, dengan demikian program dan metode sosialisasi dapat berjalan berkelanjutan, akan tetapi masi ada daerah yang belum mendapatkan sosialisasi pendidikan politik dan info pemilu pilkada kapan akan berlangsung. Sehingga hal tersebut menjadi evaluasi KPU Kota Pekanbaru dalam menyisir daerah daerah yang belum mendapatkan sosialisasi pemilu, dampak dari hal itu tersebut menjadi peningkatkan golongan putih. Dan kendala anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah juga tidak seimbang dengan wilayah seluas Kota

Pekanbaru sehingga ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan sosialisasi dan juga tidak terbentuknya relawan demokrasi, relawan demokrasi juga merupakan salah satu faktor pendorong dari kualitas partisipasi pemilih, maka dari itu relawan demokrasi adalah organisasi yang strategi untuk dibentuk.

Hal ini diperlukan Strategi KPU Kota Pekanbaru untuk bisa menyisir daerah daerah yang partisipasinya sangat rendah, sehingga KPU Kota Pekanbaru dapat mengantisipasi hal tersebut, agar masyarakat dapat sosialisasi dan pendidikan politik dari KPU Kota Pekanbaru, sehingga angka golongan putih tidak terus meningkat. Dan juga KPU harus membentuk relawan demokrasi pada pilkada untuk kedepannya, agar hasil dari pemilu pilkada tersebut menjadi lebih baik dan memuaskan.

## **2. Pemilihan Tindakan**

Pemilihan tindakan merupakan sebuah keputusan yang akan diambil, keputusan adalah suatu proses yang terus menerus (*continue*), sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut maka keputusan itu tidak mempunyai arti.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (Dalam Dwi 2019: 6) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan

kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut. Dengan pemilihan tindakan ini diharapkan KPU dapat lebih meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kota Pekanbaru Bapak Anton Merciyanto, S.Si yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020, apakah sebelum melaksanakan sosialisasi KPU Kota Pekanbaru sudah melakukan penetapan jadwal sosialisasi kepada masyarakat umum, bapak Anton mengatakan bahwa :

“Jauh hari sebelum akan dilaksanakannya pemilihan, kami dari KPU Kota Pekanbaru melakukan penetapan Jadwal apa saja yang akan kami lakukan kedepannya sehingga tujuan kami dapat tercapai dengan maksimal. Dalam menentukan tindakan salah satunya kami menetapkan jadwal, langkah ini sangat penting bagi kami karena disinilah kami akan berbagi tugas dan mendapatkan tanggung jawab yang akan kami sampaikan ke masyarakat demi berjalannya pemilihan yang jujur dan adil.”

Penelitian kemudian menanyakan bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilukada kepada masyarakat umum, bapak Anton mengatakan bahwa :

“Kami sudah memberikan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilukada.”

Dikeempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan mengajukan pertanyaan yang sama pula. Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kami dari KPU melakukan sosialisasi tatap muka, Media Masa, forum Warga, Media sosial dan lainnya. Akan tetapi, diantara beberapa metode tersebut, masyarakat lebih senang dengan cara metode tatap muka seperti melakukan seminar dan lain sebagainya, ini dikarenakan didalam komunikasi tatap muka masyarakat dapat menanyakan semua hal yang mereka kurang pahami dengan jelas dan dari pihak kami pun dapat menjelaskan dengan sangat detail dari poin-poin yang masyarakat tanyakan. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi di Media sosial dengan menggunakan situs web dan lain-lain, nah, disini kami menargetkan bahwa sasaran kami adalah para pemilih pemula dan kawan-kawan mahasiswa. Kami sangat memanfaatkan sosialisasi melalui media sosial ini, selain mudah untuk mencapai sasaran kepada masyarakat umum, sosialisasi dengan menggunakan media ini juga sangat-sangat memudahkan sosialisasi yang kami lakukan.”

Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) Bapak Herman Susilo pada Hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020. Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilukada kepada masyarakat umum. Bapak Herman Susilo mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan sosialisasi pemilukada pada masyarakat umum berjalan dengan baik, masyarakat antusias dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada kami, dan kami juga mengarahkan agar masyarakat lebih bijaksana dalam melakukan pemilihan kepala daerah, jauhi money politik ataupun yang berbau politik praktis, dan juga simulasi dalam pencoblosan sudah kami laksanakan.”

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat umum kota pekanbaru tepatnya dengan Bapak Heri salah seorang masyarakat Kecamatan Payung Sekaki yang dilakukan pada Hari Jum'at Tanggal 03 Juni 2020. Peneliti menanyakan apakah sosialisasi pendidikan partisipasi pemilih mudah dimengerti, Bapak Heri mengatakan bahwa :

“sosialisasi yang diberikan mudah dimengerti oleh masyarakat teruama saya yang hadir.”

Peneliti kemudian menanyakan kembali kepada warga yang sama, apakah Bapak Heri melakukan pencoblosan pada hari H pemilu pilkada 2018. Bapak Heri mengatakan :

“Saya tidak ikut mencoblos, dikarenakan saya ada acara keluarga di Surabaya.”

Bapak Heri mengatakan tidak antusias dalam pilkada tahun 2018, karena :

“Calon pemimpin di Riau khususnya tidak dapat dipercaya dalam menjabat selama 5 tahun, dari tahun ketahun Riau tidak pernah berubah menjadi lebih baik yang saya rasakan.”

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemilihan tindakan maka KPU Kota Pekanbaru sudah memberikan sosialisasi yang mudah dimengerti, akan tetapi hasrat dari masyarakat ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Provinsi Riau, dan hal tersebut menjadi alasan mengapa masyarakat masih tidak antusias dalam pesta demokrasi, dengan demikian angka partisipasi Kota Pekanbaru menurun, hal ini KPU harus lebih ekstra memberikan kenyamanan dan

kepercayaan kepada masyarakat, bahwa tidak menggunakan hak pilih adalah contoh terbuangnya anggaran yang sia-sia.

Tindakan dari KPU Kota Pekanbaru juga melibatkan beberapa sosialisasi yang mereka gunakan contohnya mereka lebih memfokuskan pada segmen keluarga yang memang lebih strategis dan juga pada masyarakat umum, maka dari itu peneliti memberikan saran kepada KPU Kota Pekanbaru agar melakukan sosialisasi keseluruhan segmen masyarakat, agar masyarakat yang tidak pernah memilih akan menjadi memilih ketika mendapatkan sosialisasi, sosialisasi yang diberikan merupakan salah satu dampak kualitas partisipasi pemilih pada Kota Pekanbaru.

### **3. Alokasi sumber daya**

Alokasi sumber daya adalah suatu rencana untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, contohnya sumber daya manusia, khususnya dalam jangka waktu dekat, untuk meraih tujuan untuk masa depan. Ini adalah suatu proses dari alokasi sumber daya yang langka diantara berbagai proyek atau unit.

Sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dengan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk dapat mencapai visi, misi seta tujuan yang sudah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan sumber daya panitia penyelenggara pemilukada yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pagawai KPU serta seluruh panitia ad hoc, kegiatan tersebut berupa pelaksanaan

bimbingan teknis kepada seluruh panitia pelaksana pemilukada dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan akan dikerjakan, intruksi kepada pegawai KPU dan panitia ad hoc agar memanfaatkan segala moment yang melibatkan orang banyak untuk dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi, himbauan untuk mensosialisasikan lagi kegiatan pemilukada di lingkungan kerjanya masing-masing, serta menekankan tentang pentingnya panitia ad hoc berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi. Dari pelaksanaan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU tersebut merupakan upaya yang sangat bagus karena dapat meningkatkan profesionalisme kerja penyelenggara pemilukada yang bertugas untuk melakukan sosialisasi. Selain itu upaya tersebut juga menunjukkan sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Umum KPU Kota Pekanbaru pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 Bapak Anton Merciyanto, S.Si. peneliti menanyakan bagaimana bimbingan teknis kepada panitia penyelenggara kecamatan, Bapak Anton Merciyanto, S.Si mengatakan bahwa :

“BIMTEK sudah kami berikan yang terbaik kepada panitia penyelenggara Kecamatan.”

Bapak Anton Merciyanto, S.Si mengatakan bimbingan yang kami berikan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU berupa:

“BIMTEK mencari dari daerah masyarakat yang partisipasinya rendah, daerah yang belum mendapatkan sosialisasi oleh KPU, kemudian daerah tersebut diberikan pendidikan politik, kemudian persiapan dilapangan pada saat pemilu, panitia penyelenggara kecamatan diberikan arahan untuk selalu sigap kendala apapun yang terjadi, seperti surat suara yang habis.”

Pertanyaan yang sama disampaikan oleh Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M sebagai Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Beliau mengatakan bahwa:

“BIMTEK dari Prov maupun dari Kabupaten/Kota untuk panitia penyelenggara dilakukan beberapa kali selama waktu yang telah ditentukan. Selain BIMTEK, KPU juga mengadakan Workshop untuk panitia penyelenggara. Dari BIMTEK sampai dengan Workshop yang kami lakukan Alhamdulillah tidak ada kendala yang kami hadapi. Yang mengikuti BIMTEK ini mulai dari PPK sampai dengan PPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.”

Peneliti Kemudian mewawancarai salah satu anggota PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) yaitu Bapak Irsyat Hasan yang menanyakan tentang Apakah KPU Kota Pekanbaru sudah memberikan Bimbingan Teknis kepada penyelenggara pemilu, Bapak Irsyat Hasan mengatakan :

“KPU sudah memberikan BIMTEK untuk persiapan menjelang pemilu, dan kami sudah melakukan agenda sosialisasi seperti Komunitas, seminar kekampus-kampus, Pemilih Pemula dan lain-lain, selain itu, kami PPK juga membantu KPU dalam melakukan Pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap yang insyaAllah semuanya di lakukan setelah sosialisasi dilaksanakan,”

Bapak Irsyat Hasan mengatakan ada beberapa kendala menjadi Panitia

Penyelenggara Kecamatan, yaitu :

“Kendala ketika dilapangan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, respon yang didapat terkadang rendah, bisa dikatakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemilu, dan juga kendala selisih angka yang ada di C1 yang betul betul harus dicocokkan kembali dan diverifikasi, adu data, untuk proses rekapitulasi harus sesuai dengan data yang ada, agar rekapitulasi sesuai dengan angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya”

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kota pekanbaru tepatnya dengan Bapak Heri salah seorang masyarakat Kecamatan Payung Sekaki yang dilakukan pada Hari Jum'at Tanggal 03 Juni 2020. Peneliti menanyakan apakah panitia penyelenggara kecamatan melaksanakan sosialisasi penyelenggara pemilu kepada masyarakat, Bapak Heri mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dari PPK sudah memberikan simulai bagaimana pemilu berlangsung.”

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada warga yang berbeda. Bapak Jaya mengatakan :

“Saya tidak mendapatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu tersebut pada pilkada 2018.”

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada warga yang berbeda. Bapak Yusrizal mengatakan :

“Sosialisasi sudah diberikan.”

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada warga yang berbeda. Bapak Doni mengatakan :

“Ditempat saya tinggal mendapatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu”

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan alokasi sumber daya KPU sudah melakukan yang semampunya, dari bimbingan teknis penyelenggara pemilu sampai dengan sosialisasi yang diberikan ke masyarakat, akan tetapi ada daerah yang tidak mendapatkan sosialisasi tersebut dan ada daerah yang sudah mendapatkan sosialisasi tersebut, maka dari itu alokasi sumber daya untuk dilapangan harus diperkuat dan dipersiapkan dengan matang kembali, agar masyarakat umum mendapatkan sosialisasi dan bagi penyelenggara pemilu dapat untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, hal ini mendapatkan dampak dari turunnya partisipasi jika ada daerah yang tidak mendapatkan sosialisasi, dan peran relawan demokrasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil sosialisasi yang lebih maksimal.

### **C. Hambatan-hambatan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Pekanbaru).**

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut dapat tidak terlaksanan dengan baik, dengan begitu sangat akan berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. KPU Kota Pekanbaru upaya dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilukada Tahun 2018 mendapatkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan strategi. hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Kurang dukungan berupa finansial untuk sosialisasi masyarakat umum  
Tahapan ini merupakan bagian yang penting karena dari tahapan inilah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuann yang sudah ditetapkan. KPU dalam taahapan ini mendapatkan kendala seperti anggaran sosialisaasi yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk serta luas wilayah Kota Pekanbaru sehingga pada tahapan formulasi program sosialisasi KPU belum mengcover secara keseluruhann tinakan yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi pemilukada, tetapi KPU hanya memilih beberapa alternatif tindakan yang dianggap paling penting. Dari kendala ini maka sangat penting bagi KPU dan Pemerintah untuk memperhatikan mengenai keesiapan finansial dalam hal mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilukada selanjutnya.
2. Kurangnya respon masyarakat daalam sosialisasi Berdasarkan penyajian data dimuka bahwa upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2018 maka strategi yang digunakan oleh KPU yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut KPU mendapatkan kendala yang menjadi penghambat lancaranya kegiatan tersebut karena kurangnya respon maasyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada ini, hal tersebut dilihat dari minimnya tingkaat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU. Dari kendala tersebut dapat memberikan gambaran bahwa masyarakat Kota Pekanbaru belum secara keseluruhan sadar akan

pentingnya pemilukada sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendorong respon masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilukada.

3. Keterbatasan sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh KPU Kota Pekanbaru dalam hal pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilukada Tahun 2018 menemukan kendala yang menjadi penghambat terlaksananya sosialisasi yaitu berupa di Kota Pekanbaru sendiri karena luas wilayah serta jumlah penduduk yang begitu besar sedangkan jumlah personil KPU yang terbatas sehingga menyebabkan dalam sosialisasi KPU belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat Kota Pekanbaru.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau 2018” maka pada bab ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini sudah menunjukkan ada kejelasan rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU.
2. Tahap pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi kepada seluruh segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju.
3. Tahap pengalokasian sumber daya, tahapan ini menunjukkan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis kepada seluruh panitia ad hoc yang akan melakukan sosialisasi pemilukada.

Kendala dalam menjalankan strategi KPU Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi yaitu berupa anggaran sosialisasi yang disediakan pemerintah belum seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Pekanbaru, tidak terbentuknya relawan demokrasi untuk membantu KPU dalam pelaksanaan sosialisasi kemasyarakatan.
2. Kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU.
3. Keterbatasan Sumber daya yaitu berupa jumlah personil KPU yang masih terbatas untuk menjangkau keseluruhan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru.

#### **B. SARAN**

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan dan memikirkan kendala yang akan terjadi disaat pemilu berlangsung, dan KPU kota pekanbaru harusnya lebih lengkap dan lebih memerhatikan waktu dalam bersosialisasi sehingga apa yang semua masyarakat keluhkan dan yang tidak mengerti dapat KPU kota pekanbaru terangkan. Membentuk relawan demokrasi untuk membantu KPU dalam pelaksanaan sosialisasi kemasyarakatan hal ini dapat meningkatkan angka partisipasi pilih.
2. Untuk penyelenggara pemilu harus juga lebih tanggap dalam pelaksanaan pemilu jika ada diantara masyarakat bertanya atau ada kendala yang terjadi dilapangan.

3. Untuk masyarakat seharusnya meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah atau calon yang akan dipilih dan harus meningkatkan pengetahuan dibidang media sosial atau media lainnya sehingga sosialisasi yang dilakukan KPU melalui media juga bisa di ketahui oleh masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Manik, Kamil Husni dkk. 2014. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*. Jakarta.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Supriyono, Arif. 2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jakarta Selatan. Perludem.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Cet.5*. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruliana, Poppy, 2016, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Rajawali pers
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Taliziduhu Ndraha, 2015, *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Komarudin Sahid, 2011, *Sosiologi Politik*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja GrafindoPersada Jakarta
- Cholisin (2012),*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Gatara, (2008). *Ilmu Politik*. Bandung:PustakaSetia

- Sugiyono (2012), *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Effendy, Uchjana, Onong. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Suryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung. Sinar Baru Algensindo
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

## **B. Jurnal**

- Jurnal Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat.
- Jurnal Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015
- Jurnal Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat
- Jurnal Peran KPU Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015
- Jurnal Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar

Jurnal Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015

Jurnal Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilwako Tahun 2017

Jurnal Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam Meningkatkan Komunikasi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2019

Jurnal Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi

Jurnal Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

#### D. Sumber-Sumber Lainnya

<http://repository.fisip-untirta.ac.id>

<https://media.neliti.com/media/publications/102244-ID-strategi-komisi-pemilihan-umum-dalam-upa.pdf>

[https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/riau/kota\\_pekanbaru](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/riau/kota_pekanbaru)

<https://www.kpu-pekanbarukota.go.id/>

[https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/riau/kota\\_pekanbaru/senapelan/sago](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/riau/kota_pekanbaru/senapelan/sago)

